ABSTRACT

This study was an effort to understand the Sasak people migration phenomena to Malaysia and how those activities were placed in the local development context. This study was also done to understand its contribution to development process. This research was carried out in East Lombok and some sub-districts had been taken as area research sample, such as Putriamaro, Mainagake, Kerakah, and Saketra. The sample of research areas were chosen because statistically, were the most potential international migration sources in East Lombok and Lombok island in general.

Based on this research, there are three conditions that force the Sasak people migrate from their area of origin to Malaysia, i.e. poverty, lack of opportunity, and low wage compared to destination country. The inability of local government to create new opportunity has become a main factor in all of the migration process. The increasing of unemployment growth that ambushed with the growth of opportunity also creates open unemployment and under unemployment at the origin. This fact caused frustration among those of productive age that pushed them to get a better alternative of their own.

The fact also shows that local government faced difficulties to put the benefits in a clear position in local development process. This was because there is no regulation that give possibilities for returns to involve in all of development process and policy implementation. Migrant participation is a whole development process, therefore, cannot be seen as a program made by government in order to give chance to the returns directly involved.

The major facts show of migrant workers' contribution to local economic development. The increasing of economic activities and local trading, women's migration from farm to non farm are the real phenomenon that can be seen at their contribution in the whole of development process. At the macro level, migrants' contribution has created new opportunity to improve economic activities. This phenomenon may causes that specific group such as labor agents, and "abor" (middlemen) will dominate local capital.

It can't be denied, however, that the involvement of Sasak people migrants creates a balance of local labor market. Specifically in their origin that also create a new polarization based on classical reasons such as skills and training. Finally, it cannot denied that the polarization will create differentiation based on skill and working status. Furthermore, these facts will create broader opportunity and labor market competition in formal and informal sectors that motivate small and medium economic activities at the origin.

Keywords: International Migration, Regional Development
PENGANTAR
Studi ini merupakan upaya memahami fenomena migrasi orang S kak asal Lombok Timur khususnya ke Malaysia, dan bagaimana aktritas migrasi internasional ditempatkan dalam kebijakan kebijakan pembangunan daerah setempat. Di samping itu, penelitian ini juga dilakukan untuk memahami bagaimana kontribusi migrasi internasional dalam proses pembangunan daerah yang dilakukan. Lokasi penelitian di lakukan di kabupaten Lombok Timur dengan sampel ot to kecamatan Tintanggora, kecamatan Masbagi, kecamatan Kuta, dan kecamatan Saka. Daerah-daerah ini dipilih sebagai sampel karena secara statistik daerah-daerah tersebut termasuk kantong-kantong migrasi internasional paling potensial di wilayah kabupaten Lombok Timur.

Penelitian ini terutama ditujukan untuk mengkaji dan mengidentifikasi pengaruh migrasi internasional terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi daerah Nusa Tenggara Barat khususnya Pulau Lombok, mengkaji sejauh mana migrasi internasional dijadikan sebagai strategi ekonomi alternative oleh migran dan keluarganya di dalam masyarakat tekanan tekanan baik sebelum krisis maupun ketika krisis ekonomi belangsung. Dalam konteks ini, migrasi internasional dipandang sebagai salah satu pilihan da samping pilihan-pilihan ekonomi lain, seperti melakukan migrasi sirkuler atau ulang-

38

Vol. 8, Nomor 1 (Me, 2006)
membuat data, yang
merupakan bagian yang
juga dapat diuji. Volume migrasi
maupun pola migrasi yang
berkembang dari pusat Lombok
ergantung pada kondisi
khusus yang ada di daerah
bersangkutan. Letak geografis
misalnya, sangat berpengaruh pada
pilihan arah dan pola migrasi yang
dilakukan migran. Lebih strategis
untuk timbulkan secara geografis
berpengaruh terhadap tingkat perkembangan
ekonomi daerah bersangkutan. Hal ini
padat pilihan bertambah pada model
mobilitas yang dipilih.

Dalam konteks migrasi
internasional yang berasal dari
Lombok, posisi geografis daerah juga
dapat mempengaruhi pada pola dan
eros migrasi yang berkembang. Hal ini
dapat diperkuat dengan akses
migrasi dan bawa migrasi antar negara
juga berkaitan dengan aspek sejauh
migrasi yang berlangsung antara
dwail dan daerah ripuan terlalu.

Kabupaten Lombok Timur
merupakan wilayah kiblatan yang
letaknya cukup strategis di wilayah
timur Pulau Lombok karena posisinya
yang merupakan jalinan ekonomi
yang menghubungkan wilayah Nusa
Tenggara Barat dan wilayah Nusa
Tenggara Timur. Kabupaten ini
terletak di antara 116-117° BT, 8-9 LS
dengan batas-batas sebagai berikut: Di
sebelah utara berbatasan dengan lautan
Jawa, Sebelah selatan berbatasan
dengan Samudra Indonesia, sebelah
Barat berbatasan dengan Kabupaten
Lombok tengah dan sebelah timur
berbatasan dengan Selat Alas yang
memotong Pulau Lombok dan Pulau
Sumbawa. Melihat kondisi
geografisnya, kabupaten Lombok
Timur termasuk daerah yang cukup
potensial secara ekonomi. Kecakapan
ekonomi yang kaya terutama dari sektor
pertanian dan kehutanan merupakan
andalan daerah yang dapat ditopografi

(2004)}
untuk kepentingan pembangunan daerah.

Wilayah ujung timur pulau Lombok ini sekaligus merupakan salah satu pintu keluar menuju kawasan timur Indonesia. Oleh karena itu, akses transportasi laut dari ini termasuk cukup baik, lebih-lebih positionnya sebagai wilayah penyegara beredar dengan wilayah pantambangan (timas) terbesar kedua setelah Free Port Papua. Namun demikian, tidak dapat disangkal bahwa meskipun akses transportasi laut ke berbagai wilayah lain cukup memadai, hubungan tanaportasi laut justru merupakan persoalan yang cukup memprihatinkan, terutama berizaan dengan sosteportasi darat antar pulau maupun antar provinsi. Di dalam wilayah kabupaten Lombok Timur sendiri, sebagian besar angkutan darat yang menghubungkan antar daerah masih menggunakan angkutan tradisional, dan kendaraan-kendaraan kapitas kecil, seperti sepeda motor maupun colt-colt angkutan perdana.


pengubah pada hubungan yang terjadi menjadi hubungan formal melalui batasan-batasan bunak dan pokok yang ada. Oleh karena itu, formalisasi tersebut kemudian dihasilkan terminologi-terminologi legal atas illegal terhadap kuasa-kuasa migran antar negara yang terjadi.


POTENSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jika dalih dar ini ekonomi, sebagian besar kehidupan perekonomian di Kabupaten Lombok Timur didukung oleh aktivitas perairan. Meski demikian, tidak besar bahwa aktivitas ekonomi non pertanian tidak berkontribusi. Aktivitas ini sangat dapat dikatakan menjadi salah satu faktor sekunder yang memiliki andil dalam pengembangan perekonomian, di sehubungan wilayah kabupaten Lombok Timur aktifitas


Disamping aktivitas sektor pertanian yang mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah ini, sektor non pertanian pun dapat dikatakan memegang peranan penting. Aktivitas, perumahaan sektor non-pertanian tersebut sesungguhnya sangat berarti pada perkembangan aktivitas rektor petani. Ini berarti bahwa sektor non pertanian sesungguhnya merupakan sektor sekaligus yang pendayagunaannya tenggang pada kondisi pertumbuhan ekonomi makro wilayah bersangkutan.

Sejarah industri cokelat (kepada) merupakan sektor yang paling dominan berbahan di luar sektor pertanian. Sektor ini hampir terdapat di daerah-daerah di seluruh wilayah kota dan, termasuk demikan, tidak semua desa di Lombok mengembangkan secara serius menjadi sebuah industri yang layak jual.

Kecamatan Masbagik dan kecamatan Pangerango yang menjadi sampel penelitian ini merupakan wilayah yang memas berbagai industri kerajinan, khususnya kerajinan tenun adalah sebagai salah satu andalan yang penting dibanggakan. Hal ini tentu sudah seperti kondisi daerah tersebut sampai dengan daerah lainnya wisata. Pertumbuhan industri kerajinan tenun digolong di daerah tersebut secara umum telah meman beni memberi kendal dalam meningkatkan pendapatan penduduk.

Sejauh digali kembali pembagian di daerah tersebut adalah bahwa daerah dengan wisata, pertumbuhan industri kerajinan tenun menghasilkan perkembangan yang cukup pesat. Jika sebelumnya kerajinan tenun merupakan bagian budaya yang harus dihargai oleh setiap warga yang beragama dewasa, maka seluruh industri kerajinan tenun merupakan warga untuk mendukung meningkatkan pendapatan keluarga yang melibatkan banyak tenaga kerja warga tanpa melalui perbedaan umurn. Dengan demikian, dapat dikatakan industri kerajinan tenun dapat
rizi meliputi kerajinan tenun, gerabah, dan kerajinan anyaman.

Sistem irigasi yang dikembangkan di wilayah-wilayah petaniin potensial, kenyataannya mempunyai pengaruh signifikan panen yang dapat menggantikan kehadiran perkebunan wilayah tersebut. Subsah misalnya, merupakan sebuah sistem irigasi yang masih diterapkan di beberapa wilayah puncak melandungi konflik suku etnik dan perang dalam penggunaan air yang konsisten. Sistem ini merupakan sebuah sistem pengairan yang dikelola secara sederhana dengan pengawasan dari masyarakat secamatan, melalui ramtri pengawal. Berbeda dengan pengairan subsah di Bali yang bersifat religi, yaitu sebagai bagian dari kegiatan ritual, subsah yang dimaksudkan dalam konteks masyarakat Saregah lebih difungkan sebagai alat kontrol produksi pertanian. Dengan demikian tidak berkaitan dengan aktivitas keagamaan.

Kecuali betonum pada sektor petanian, kehadiran perkebunan wilayah tersebut juga mengendalikan sektor non pertanian, seperti industri pariwisata, dan industri kerajinan. Subsah pariwisata, khususnya wisata alam merupakan salah satu andalan yang banyak mendatangkan devisa. Wilayah penginapan di bagian utara kabupaten tersebut merupakan salah satu tujuan wisata yang banyak dimanfaatkan wisatawan internasional domestik. Hal tersebut mengingat kondisi yang masih sangat alami budaya dan budaya, dan memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi sebagai pesinggahan kolonial Belanda.

Masihnya pertumbuhan pariwisata di daerah ini pada gilirannya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi atau tingkat pendapatan penduduk secara keseluruhan. Kecuali ini, hal yang tidak kalah pentingnya dari pengalaman industri pariwisata tersebut adalah berkembangnya sektor-sektor ekonomi informal sebagai sektor ekonomi alternatif. Hal ini, misalnya terlihat pada peningkatan income perkapita penduduk.
dikatakan merupakan salah satu produk subsisten di laur sektor pertanian.

Berkebergantungan industri senan rumah tangga tersebut pada gula mereka mempengaruhi tingkat pendapatan penduduk yang berasal dari laur aktivitas pertanian. Tabel berikut memperlihatkan peningkatan aktivitas ekonomi di laur sektor pertanian selama kurun waktu 2000 (sampai saat penelitian dilakukan). Dari data yang diperoleh disitas dapat dilihat bahwa industri kerajinan tenun merupakan industri kerajinan yang paling dominan dikerjakan di beberapa wilayah kabupaten Lombok Timur.

Namun demikian, tingkat produktivitasnya yang relatif rendah menyebabkan industri ini mengalami kesulitan untuk berkembang sehingga untuk menyebut banyak tenaga kerja pun hampir tidak menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu sebagian besar tenaga kerja yang terlibat dalam industri ini memilih alternatif lain seperti melaksanakan migrasi ke laur untuk tujuan-tujuan ekonomi produktif lainnya.

Data yang ditemukan memperlihatkan jumlah penduduk usia produktif (di kabupaten Lombok Timur yang melakukan aktivitas di laur sektor pertanian yaitu 68.329 atau 45,8 persen dari jumlah penduduk usia penduduk produktif. Ini berarti aktivitas sektor pertanian masih menjadi primadona untuk sebagian waktu. Hal yang menarik adalah bahwa jika melihat perbandingan desa kota relatif bahwa aktivitas sektor non pertanian justru lebih besar di pedasam dibandingkan dengan pertanian.

Hal ini kemungkinan disebabkan oleh renggaun besar aktivitas ekonomi non pertanian pun masih berkembang di laur wilayah perluatan yang cenderung menjadi pasat pemerintah. Namun demikian, bersama jumlah penduduk usia produktif yang bekerja di sektor pertanian tidak dikisii oleh terjadinya peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, bersama jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian semestara produktivitas pesatuan tenaga kerja sendah menyebabkan penduduk mencari alternatif lain yang dianggap memberi produktrivitas yang lebih baik. Pilihan menjaditennaga kerja ke laur terluar kemudian menjadi alternatif meskipun sesuatu hubungannya calo tenaga kerja bersangkutan sama selali bisa tetantang kondisi sebenarnya dari daerah tujuan.

Manipulasi informas yang dilakukan oleh para calo tenaga kerja (taiyong) khususnya menyebabkan kondisi kerja dan terutama upah yang akan diterima oleh tenaga kerja menyebabkan calo mungkin potensial tidak lagi dapat mengambil pertimbangan-pertimbangan jernih. Disinging itu, beban hidup yang makin berbimbah sem-entara produktivitasnya di daerah asal dipandang tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kekangannya juga menyebabkan calo migran memutuskan untuk bermigrasi kehar man-NPwilayah yang dianggap lebih menjanjikan secara ekonomi.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Lapangan Usaha</th>
<th>L + P</th>
<th>Persentase</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Perusahaan</td>
<td>167.880</td>
<td>42.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Pertambangan/Pengolahan</td>
<td>10.830</td>
<td>2.7</td>
</tr>
<tr>
<td>Industri Pengolahan</td>
<td>43.230</td>
<td>11.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Listrik/gas/Air bersih</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bangunan</td>
<td>16.898</td>
<td>4.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Pelayaran/Hotel/restoran</td>
<td>85.469</td>
<td>21.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Transportasi dan komunikasi</td>
<td>29.829</td>
<td>7.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Jasa Keuangan</td>
<td>2.045</td>
<td>0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Jasa Kemasarakan</td>
<td>38.933</td>
<td>9.8</td>
</tr>
<tr>
<td>Lainnya</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>394.732</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Sumber: Lombok Timur dalam Angka 2000*

Sebelum ditetapkan undang-undang otonomi daerah, perencanaan pembangunan daerah baik pada tingkat kabupaten maupun pada tingkat Provinsi di dasarkan pada rencana pembangunan lima tahunan yang terus-menerus dalam REPELITA dan REPELITADA. Perencanaan pembangunan melalui perencanaan terencana lima tahunan tersebut lebih memiliki karakter sentralisitir. Perencanaan dan perencanaan pembangunan di daerah kemudian sangat tergantung pada prioritas politik yang kurang mengakar pada kebutuhan daerah setempat.

Reformasi politik yang terjadi pada beberapa tahun lalu telah menciptakan warba baru bagi perencanaan pembangunan wilayah di seluruh Indonesia. Kehadiran semangat reformasi dan otonomi daerah telah menciptakan kesegaran baru dalam perencanaan pembangunan yang benar-benar berdasarkan kepada kepentingan daerah tersangkutan. Meskipun disadari bahwa kehadiran reformasi pembangunan yang tetap memutus tersebut telah menciptakan konflik kepentingan pusat dan daerah, tetapi secara makro telah memberikan pelajaran berharga bagi daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan berdasarkan kebutuhan daerahnya masing-masing.

Kabupaten Lombok Timur yang merupakan salah satu kabupaten
di Nusa Tenggara Barat pun mula
melakukan perbaikan dan
perencanaan-perencanaan
pembangunan ke depan. Rencana
Pembangunan Strategis Kabupaten
(BENSTRA) merupakan ujiud
semangat lokalitas dalam pemanu
pembangunan daerah yang bertumpu
pada kebutuhan-kebutuhan
masyarakat daerah. Renstra yang
meliputi suatu dasar untuk pedoman
pembangunan yang dilaksanakan
sementara merupakan penjabaran dari
pembangunan yang dirancang untuk
keperluan dua tahun ke depan.
Perubahan-perubahan perencanaan
pembangunan di sistem
perencanaan lama tahunan (PELITA)
ke pola perencanaan dua tahunan
(RENSTRA) secara terus menerus
mempromosikan evaluasi
keberhasilan pembangunan di
berbagai bidang kebijakan. Di
samping itu, sistem tersebut juga
memungkinkan terjadinya perubahan-
perubahan mendadak dalam perencanaan
pembangunan yang tidak terpikir pada
saat perencanaan renstra periode
pembangunan yang sebelumnya.

Untuk menekankan program
pembangunan daerah yang telah
diatur dalam renstra
pembangunan daerah tersebut,
kabupaten telah melakukan efektivitas
pelaksanaan pembangunan melalui
upaya pengembangan wilayah
kecamatan di seputih kecamatan
sebelum reformasi menjadi 20
kecamatan pasca otonomi daerah.
Pengembangan salah kecamatan ini
pada garisnya diharapkan mampu
secara efektif melaksanakan program-
program pembangunan yang telah
disusun dalam garis-garis besar
pembangunan daerah yang tertuang
dalam rencana strategis pembangunan
daerah.
Ada tiga isu penting yang patut
mendapat perhatian serius dalam
konteks diskusi yang dilakukan ini.
Isu-isu ini yang berkaitan dengan
perencanaan pembangunan bidang
ekonomi, sumberdaya manusia dan
dispensa이 및 potensi sumberdaya
alam. Ketiga isu ini dianggap penting
karena membutuhkan kaitan yang berfokus
didaktik dengan isu-isu migrasi
internasional yang berkembang
terutama dari kabupaten Lombok
Timur. Dua isu tersebut (ekonomi dan
sumberdaya manusia) merupakan isu
yang paling erat relevannya dengan
fenomena dalam seluruh diskusi
mengingat peranannya yang sangat
besar dalam aktivitas-aktivitas migran
yang berlangsung. Isu-isu tersebut
dapat menjadi variabel penting untuk
melihat dari stau sosial-ekonomi
macam apa migran bersaldai dan jenis
pekertan apa saja yang mampu
dilakukan migran, baik di daerah asal
maupun di-daerah tujuan.

Seperti telah dibahas
sebelumnya dalam bab-bab terdahulu bahwa
efektivitas pelaksanaan pembangunan
tidak akan dapat dicapai tanpa
melakukan perencanaan marang yang
berkas pada kepentingan
kepentingan masyarakat lokal. Oleh
karen itu, redifinisi dan
konseptualisasi pembangunan
dengan melalui perubahan
perubahan paradigma pembangunan
yang seloknya bersesuaian
diharapkan banyak pengakomodasi kepentingan lokal dalam seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal pula kemungkinan muncul sikap over confidence dari pemerintah setempat yang menyebabkan orientasi pembangunan keluar dari arah yang telah ditetapkan dalam Renstra pembangunan daerah.

Dalam konteks migrasi internasional yang banyak berlangsung terutama dari daerah-daerah penelitian, pemerintah daerah secara umum telah berupaya memposisikan suatu tesebut dalam konteks pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Akan tetapi, substansinya perencanaan pembangunan bidaqg tersebut belum mempertimbangkan kontribusi emisi dari tenaga kerja yang melakukan aktivitas ekonomi di luar negeri sebagai salah satu komponen penting yang dapat dihitung dalam pembangunan ekonomi pada umumnya. Kondisi ini menyebabkan suatu migrasi internasional yang sebenarnya paling menonjol di wilayah Lombok Timur menjadi kurang diperhitungkan dalam proses pembangunan yang dilaksanakan.

Realitas yang ada adalah bahwa pemerintah daerah mengalami veselitan unik menempatkan migran pada satu posisi yang jelas di dalam proses pembangunan daerah karena tidak adanya suatu regulasi yang memungkinkan migran untuk tetap dalam implementasi kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, keterlibatan migran dalam seluruh proses pembangunan daerah tidak dapat dilihat sebagai sebuah program yang sengaja dibangun pemerintah untuk memberikan peluang kepada keterlibatan langsung migran. Tetapi pada sisi lain, mengingat kondisi yang kurang menguntungkan bagi kelompok besar migran pekerja internasional dari daerah bersangkutan.

MIGRASI INTERNASIONAL: PROSES DAN LEGALITAS
Kebijakan pemerintah lokal dalam bidang ketenagakerjaan khususnya menyangkut aktivitas migrasi tenaga kerja luar negeri yang dimanfaatkan dalam suatu posisi dalam rencana strategis pembangunan wilayah merupakan hal positif yang dapat dilihat selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pada masa-masa sebelumnya porsdon migrasi terutama kerja asal Lombok bagi pemerintah setempat hampir dapat dikesan sebagai beban pola pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat umumnya. Namun demikian, setengah dengan perembangan dan keterlibatan daerah, pemerintah lokal pun mulai mengambil sikap kebijakan yang rasional. Migrasi internasional mulai dilihat sebagai sebuah aspek penting dalam proses pembangunan lokal. Keterkaitan ini muncul terhadap masalah aspek migrasi dalam rencana strategis pembangunan daerah di samping masalahnya persusutan tersebut dalam rencana
APRD yang menganggarkan dana klinik tenaga kerja sebesar 1,5 milyar pada tahun 2002.

Meskipun demikian, berdasarkan observasi yang dilakukan sepanjang pelaksanaan program tersebut, hal ini bermasa polis dibandingkan dengan kepentingan pemberdayaan ekonomi migrasi. Hal ini menyebabkan program yang sebenarnya sangat strategis tersebut hampir tidak dapat berjalan seperti diharapkan. Paling tidak ada usaha yang dilakukan untuk memastikan kebijakan yang telah disusun tidak berarti, baik secara politik, khususnya mengenai kenyamanan tenaga kerja baik dalam maupun luar negeri. Dalam arti bahwa kebijakan khusus tenaga kerja yang mewajibkan salah satu program pembangunan bidang ekonomi tersebut tidak memiliki arah yang jelas. Hal ini menyebabkan kebijakan yang dianggap mendasar dalam pelaksanaan program di lapangan, yaitu tenaga kerja yang telah digaji tidak menerima penghargaan yang ditinjau dalam APRD.

Terlepas dari kontroversi tersebut, secara teoritis perkembangan migrasi internasional tidak dapat dipisahkan dari perkembangan regional yang meliputi aspek-aspek ekonomi, politik, sosial baiknya. Oleh karena itu dapat pula dikatakan bahwa fenomena migrasi sebenarnya merupakan bagian integral dari sebuah proses pembangunan yang memiliki karakter-karakter universal. Dalam konteks makro, secara keseluruhan makro baik potensi hewani ekonomi di suatu wilayah, atau negara makin besar kemungkinan terciptanya perluasan keja dan pada gilirannya makin besar pula peluang terjadinya aktivitas migrasi masal maupun migrasi keluar.


Dalam konteks ekonomi aktifitas migrasi yang berlangsung kemana-mana dilakukan arus arah kepentingan ekonomi, yaitu melakukan aktivitas ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan

Volum 8, Nomor 1 (Edi 2004)
kesepakatan keluarga. Di sisi lain, aktivitas tersebut juga dilakukan dalam rangka meningkatkan status sosial migran dan keluarganya di daerah asal. Meskipun dalam konteks ini posisi migran pekerja di daerah asal berada pada level terendah dalam struktur sosial dan ekonomi, tetapi di daerah asalnya migran dan keluarganya mengalami peningkatan status yang sangat berarti.

Realitas meningkatnya status sosial ekonomi migran dan keluarganya mendorong kelompok-kelompok penduduk potensial untuk mengambil langkah-langkah ekonomi alternatif tersebut untuk keberadaan dan kekuatan ekonomi di dalam keinginan untuk meningkatkan bargaining power sosial-kultural dalam komunitas masyarakat. Melakukan aktivitas migrasi internasional terutama ke Malaysia menjadi pilihan utama yang dilakukan oleh kelompok penduduk Sasak pada umumnya.

Fakta yang ditemukan sepanjang perlihatan menunjukkan bahwa meskipun kedua negara telah melalui koreksi-koreksi birokrasi migrasi, tetapi sangat sulit untuk memastikan penekanan informal dalam sehingga proses migrasi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Sasak khususnya di daerah Lombok. Paling kuat ada tiga faktor penting yang menyebabkan kedua jalur birokrasi yang berseberangan tersebut dapat berjalan bersama. Pertama, jalur-jalur non formal yang berkembang dalam aktivitas migrasi orang Sasak jauh lebih populer dibandingkan dengan birokrasi legal yang digunakan sebagai pendekatan pemerintah. Kedua, sebagian besar migran dan calon migran potensial memerlukan jasa yang mereka peroleh di segera tanpa lebih cepat. Dengan demikian, birokrasi legal formal hanya diperlukan untuk melengkapi dokumen perjalanan dan dokumen keuarga yang dibutuhkan. Ketiga, perbedaan masyarakat dan keluarga migran potensial terletak menganalisis jalur legal yang diselenggarakan pemerintah terhadap masyarakat dan memakan waktu lebih lama. Hal ini menyebabkan populasi migrasi pemerintah khususnya Departemen Tenaga Kerja dan Pekerjaan Dariah umumnya hanya dapat bergerak dalam jarak jauh dari tenaga kerja lebih lama.

Satu karakter yang paling menonjol dari aktivitas migrasi orang Sasak asal Lombok adalah bahwa sebagian besar aktivitas migrasi yang dilakukan terutama ke luar negeri berlangsung dalam kerangka ekonomi. Ini berarti bahwa kepentingan ekonomi merupakan alasan utama yang menjadi sebagian besar migran Sasak melakukan perjalanan ke Malaysia atau ke negara-negara lainnya. Di sisi lain, kecenderungan yang sebanding dan kualitas pendidikan pekerja migran yang juga rendah menjadi cetak yang memiliki pas aktivitas migrasi yang berlangsung. Kondisi tersebut pada gilirannya menyebabkan renumenahnya pemahaman sebagian besar tenaga kerja terhadap perkembangan
proses biokrasi khususnya dalam bidang keramaian kerja.

Nasrun demikian, kesadaran lokal pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang memadai di segala bidang seiring dengan semangat otomoni daerah membuka ruang cukup lebar untuk terjadinya dialog antara berbagai elemen kepentingan yang bersebaran. Di dalam konteks dialog yang dimaksud tersebut di dalamnya adalah terbukanya ruang dialog antara kepentingan tenaga kerja dan calon tenaga kerja migran potensial dengan kepentingan pemerintah lokal secara keseluruhan. Oleh karena itu, sebagai bentuk kesadaran pemerintah untuk membina potensi tenaga kerja yang ada dan berdasarkan realita lokal pemerintah telah memasukkan komponen tenaga kerja migran internasional di dalam kebijakan-kebijakan pembangunan yang ada, seperti dilakukannya perpajakan daerah Lombok Timur. Mewakili komponen pembinaan tenaga kerja yang disebut sebagai program khusus tenaga kerja di Lombok Reog guru Anggun Pembangunan Daerah (RgPPBD) minatnya merupakan bentuk nyata dari keinginan pemerintah untuk secara serius mempertimbangkan aspek tenaga kerja internasional dalam proses pembangunan.

Di sisi lain dalam konteks yang lebih luas, khususnya berkaitan dengan mekanisme pembinaan tenaga kerja internasional pemerintah daerah telah secara jelas memberikan perhatian serius mengenai hukum belasan ada aturan yang benar-benar menghargai
kepentingan pemerintah di satu sisi dengan kepentingan ekonomi tenaga kerja dan keberlangsungan di sisi lain.

Melihat kenyataan yang ada seperti penelitian, maka sangatlah wajar jika legalisasi proses migrasi yang ditawarkan pemerintah melalui departemen tenaga kerja hampir tidak mendapat respon publik yang memadai. Dengan demikian, realitas sosial ekonomi migran, seperti tingkat pendapatan, ketumpatan dan penduduk sebagian besar migran seperti disajikan dalam buk-buk terdahulu dapat memperjelas kegagalan kegagalan pemerintah dalam program penempatan tenaga kerja legal yang dikerjakan terutama ke Malaysia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Dalam konteks migrasi ilegal yang berkembang dari pulau Lombok khususnya dari Lombok Timur, kedua paradigma ekonomi pasar birokrasi menjadi hal dominan yang mendorong berkembang berbagai migrasi ilegal. Dari aspek ekonomi, rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan peluang kerja yang memadai menjadi hal dominan menyebabkan terjadinya ekstremis tenaga kerja ke luar negeri terutama ke Malaysia yang memiliki kesempatan kerja lebih besar dan bervariasi. Realitas ini diperburuk lagi oleh tingginya perbedaan tingkat upah antara kedua wilayah sehingga dihadapi pada bagian-bagian awal disusun dalam disertasi ini.

Di sisi lain, karakter birokrasi migrasi yang relatif ketat dan sedikit "korup" baik di negara asal maupun negara tujuan juga membedakan peluang bagi berbagai bentuk migrasi ilegal. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan sepanjang penelitian di tiga-tiga pening yang berkaitan dengan aktivitas migrasi internasional, seperti di luaran atau DEPNAKER terlihat terbagai berbagai kesulitan birokrasi migrasi sebenarnya sangat tekik dengan mental birokrat yang kurang memadai untuk sebuah aktivitas pelayanan publik. Untuk sebuah proses pasporisasi di Imigrasi menjadi, sebuah paspor baru yang normalnya seharga Rp.250.000- Rp.300.000 bisa menjadi lebih dari Rp.1.000.000. Kondisi ini menyebabkan seorang calon agen tenaga kerja akan memberikan tarif pengurusan dokumen satu setengah kali lipat di ans bangsa yang dibahas untuk merealisasikan dokumen keimigrasian.

DAMPAK MIGRASI INTERNASIONAL TERHADAP PEMBANGUNAN LOKAL

Berdasarkan rangkai penelitian yang dilakukan, paling kurang ditemukan ada tiga kondisi yang menyebabkan migrasi pekerja orang Sabat dari Lombok Timur menemui kesulitan membuat aktivitas di luar wilayahnya. Ketiga kondisi tersebut adalah, kemiskinan, rendahnya kesempatan kerja dan rendahnya tingkat upah penawaran tenaga kerja. Tingginya angka kemiskinan di daerah asal menyebabkan sebagian besar penduduknya mencari kemungkinan-mungkinan lain di luar wilayahnya untuk tetap bertahan.
Kesulitan-kesulitan ekonomi tersebut kemudian mendorong mereka untuk menggunakan keputusan-keputusan ekonomi rational yang mungkin. Migrasi internasional merupakan salah satu solusi yang digunakan oleh masyarakat Luar pertanian sebagai upaya desakan penduduk yang tidak bebas juga menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan peningkatan aktivitas migrasi keluar dari daerah-daerah berbantuan.

Di samping kemiskinan, rendahnya tingkat upah di daerah juga menjadi faktor penting lain yang berpengaruh besar terhadap penduduk negara. Volume migrasi internasional adalah kecenderungan tingkat upah per tani menurun tenaga kerja yang sangat mencolok antara daerah asal dan daerah tujuan menjadi faktor dominan yang menyebabkan aliran tenaga kerja internasional keluar dalam jumlah yang bantah tidak dapat diprediksi. Kehalanya sebagian besar tenaga kerja tersebut lebih jauh membantu kerjaan-kerjaan berdaerah asal terkad berkaitan dengan implikasinya terhadap menurutnya cakupan berdaerah asal terkad berdasarkan tenaga kerja yang dipilih dalam migrasi. Pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan kecenderungan kerja mendorong terjadinya pengangguran terbesar masyarakat segera pengungguran di daerah asal. Hal ini menyebabkan munculnya rasa perasaan di kalangan kelompok penduduk usia kerja yang pada gilirannya mendorong kelompok tersebut mencari alternatif sendiri yang dianggap lebih baik. Migrasi internasional (terutama yang dilakukan secara ilegal) kemudian menjadi alternatif lain untuk tetap.

**Kesimpulan**: yang kertas mengungkapkan bahwa migrasi adalah isu yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Ia tidak hanya berhubungan dengan faktor ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan. Peningkatan tingkat pengangguran di daerah asal dan peningkatan upah di daerah tujuan menjadi dua faktor utama yang mempengaruhi keputusan migrasi. Migrasi tidak hanya terbatas pada penduduk yang bekerja, tetapi juga termasuk penduduk yang tidak bekerja. Diperlukan upaya concerted dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah migrasi ini.

**Saran terhadap**

1. Pemerintah harus melakukan upaya untuk mendorong pembangunan daerah asal agar masyarakat tidak perlu berpindah ke daerah lain.
2. Pemerintah harus melakukan pendidikan dan pencegahan terhadap migrasi ilegal.
3. Masyarakat harus memahami dampak dari migrasi dan berusaha untuk tetap di daerah asal.

**Perihal**: Volume II, Nomor I (Desember 2018)
bisa berubah, meskipun sebagian besar mereka mengambil pihak tersebut dengan segala resiko yang didaati.

Namun demikian, jika dilihat berdasarkan karakteristik migran, dapat disimpulkan bahwa aktivitas migrasi yang berlangsung dari kabupaten Lombok Timur sebagian besar dilakukan oleh kelompok usia produktif. Kelompok ini secara berkaitan memiliki aktivitas migrasi sebagai bentuk pilihan alternatif paling rasional untuk kebutuhan dari jenjarom pengangguran dan dilakukan oleh kelompok-kelompok migran Sasak cenderung dilakukan di dalam kerangka jaringan ketiga yang dibangun secara tradisional dan dilegami secara sosial keutuhan oleh sebagian besar masyarakat Sasak. Kondisi ini yang menyebabkan pemeringatan setempat mengalami kesulitan untuk membekukan atau mengatur perjalanan kegiatan migrasi ilegal dari daerah terluar.

Di samping di lihat dari aspek pendidikan, sebagian besar migran Sasak yang melakukan aktivitas migrasi ke luar negeri terutama melalui jalur ilegal sebagian besar mereka memiliki latar belakang Sekolah Dasar ke bawah. Hal ini memberikan gambaran bahwa aktivitas migrasi yang dilakukan oleh kelompok penduduk yang tidak memiliki keterampilan keuasti melakukan aktivitas di sektor pekerjaan kasar seperti buruh tani dan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Umur</th>
<th>Jumlah</th>
<th>Persentase</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0-19</td>
<td>35</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>20-24</td>
<td>111</td>
<td>31.2</td>
</tr>
<tr>
<td>25-29</td>
<td>75</td>
<td>22.6</td>
</tr>
<tr>
<td>30-34</td>
<td>68</td>
<td>19.4</td>
</tr>
<tr>
<td>35-39</td>
<td>33</td>
<td>9.4</td>
</tr>
<tr>
<td>40-44</td>
<td>15</td>
<td>4.3</td>
</tr>
<tr>
<td>45+</td>
<td>9</td>
<td>2.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Jumlah</td>
<td>350</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Data primer 2001
petani penggaraap (bukan pemilik). Berdasarkan hal ini dapat pula dikatakan bahwa aktivitas ekonomi yang didukung merupakan aktivitas ekonomi yang semata-mata ditujukan untuk mendapatkan penghasilan dan meningkatkan status sosial ekonomi keluarganya. Realitas ini juga tehad dari besarnya ekonomi sebagian besar migran yang berangkat dari status sosial ekonomi menengah ke bawah bahkan ada yang berasal dari keluarga yang tidak mampu sama sekali. Realitas lain yang ditemukan adalah bahwa sebagian besar migran juga merupakan kelompok penduduk yang sudah kawin. Ini menunjukkan bahwa beban ekonomi keluarga yang dianggap oleh migran sebagai kepala keluarga menyeimbangkan mereka mengatasi kebutuhan kebutuhan yang diperlukan agar mampu bagi peningkatan status ekonominya. Meskipun demikian, tidak dapat disengaja pula untuk alasan-alasan yang berbeda aktivitas migrasi yang sama juga didukung oleh kelompok penduduk dari tingkat pendidikan dan variasi sosial ekonomi yang terdiri dari keluarga migran tenaga kerja bebasangkatan.

Secara keseluruhan, potensi besar sumber daya manusia yang tersedia di daerah pada hakikatnya merupakan salah satu modal pembangunan yang sangat penting. Akan tercapai, jika kebijakan pembangunan akan sumberdaya masyarakat tidak sebatas dengan jumlah persentase tenaga kerja, maka sudah pasti akan terjadi persaingan yang sangat tinggi. Akibatnya terjadi penumpukan tenaga kerja sebagai konsekuensi daya serap pasar yang rendah. Realitas ini menyebabkan migrasi tenaga kerja khususnya yang berasal dari Lombok Timur melakukan aktivitas migrasi dalam jangkaan yang lebih luas.

Tabel 3
JUMLAH MIGRAN ILEGAL SAKAS BERDASARKAN UMUR DAN PENDIDIKAN

<table>
<thead>
<tr>
<th>Umur</th>
<th>Tingkat Pendidikan</th>
<th>Jumlah</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Nigaran</td>
<td>SD</td>
<td>SLTP</td>
</tr>
<tr>
<td>10-24</td>
<td>84</td>
<td>32,0</td>
</tr>
<tr>
<td>25-29</td>
<td>89</td>
<td>26,3</td>
</tr>
<tr>
<td>30-34</td>
<td>56</td>
<td>21,7</td>
</tr>
<tr>
<td>35-39</td>
<td>29</td>
<td>11,0</td>
</tr>
<tr>
<td>40+</td>
<td>24</td>
<td>9,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Jumlah</td>
<td>262</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Data Pemerintah 2008

2004

VOLUME 8, NOMOR 1 (Maret 2004) 31
seperti migrasi internasional. Namun demikian, realitas ekonomi yang tidak menguntungkan, seperti rendahnya tingkat pendapatan keluarga yang rata-rata hanya Rp. 10.000 per bulan, dan budi daya rumah cantik oleh banyak keluarga yang rata-rata 5 orang per keluarga menjebakkan sebagian besar memilih jalur alternatif migrasi.

Hal yang pantas dicatat dari tingginya tingkat persaingan tenaga kerja tersebut adalah bahwa secara teori jika persaingan makro tinggi, reala pada tingkat tertentu akan diikuti pula oleh munculnya kompetisi tenaga kerja berdasarkan kualitas yang dibutuhkan pasar. Koordinasi ini pada gilirannya membayak kelompok tenaga kerja di dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok skilled yang bersaing untuk memperoleh posisi tawar yang lebih tinggi di satu sisi, dan di kelompok lain bersaing pula kelompok unskilled yang bersaing untuk memperoleh posisi tawar yang lebih rendah. Kelompok perasa yang bersaing ini pun konsistensial masyarakat desakan ke bawah sehingga menimbulkan munculnya kelompok-kelompok marginal yang tidak mampu bersaing untuk memperoleh kesempatan kerja di pasar kerja nasional maupun lokal.

Kelompok inilah yang kebanyakan melakukan mobilitas ke laut dan daerah-daerah lain yang dianggap memiliki kemungkinan ekonomi lebih baik.

Hal menarik yang juga dapat dilihat dari penelitian ini adalah bahwa aktivitas tenaga yang dilakukan oleh kelompok migran saks dari daerah penelitian memulai kontribusi besar terhadap pembangunan desa. Jumlah besar desis yang dibahas dalam temuan yang dikemukan di daerah secara umum juga memberikan sumberan besar kepada daerah sehingga proses pembangunan yang dilakukan tanpa disadari juga dibantu oleh kelompok migran tersebut. Namun demikian, di satu sisi, meskipun kontribusinya cukup besar dalam proses pembangunan, aktivitas yang dilakukan belum diperhitungkan di dalam seluruh kebijakan pembangunan yang dibuat terutama pada tingkat lokal. Koordinasi ini secara makro memberikan sumbangan bahwa pemerintah daerah telah memiliki kepedulian terhadap fenomena migrasi yang berkembang di daerahnya meskipun sebentaranya pemerintah setempat menyadari besarnya kontribusinya yang diberikan oleh migran meskipun pada skala mikro. Oleh karena itu, melihat perkembangan positif besarnya angka remata yang dibahas oleh kelompok migran tentu keberadaan tersebut, pemerintah daerah nampaknya perlu memulai suatu model pembentaran ekonomi yang mampu menarik sebagian besar daerah yang dibawah pemerintah daerah ini untuk negeri untuk kepentingan pembangunan ekonomi yang lebih luas.

Akan tetapi, jika dilihat secara lebih mendalam jumlah besar temuan yang masuk ke Nusa Tenggara Barat dan lalu mereka ke wilayah kabupaten Lombok Tengah kenaysianan tidak mampu secara signifikan mendorong
<table>
<thead>
<tr>
<th>Rata-rata Pengurusan</th>
<th>Kuasai Pengurusan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>1/2 %</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1/2 %</td>
</tr>
<tr>
<td>M1 1000</td>
<td>15 42,9</td>
</tr>
<tr>
<td>M1 1000-2000</td>
<td>11 31,4</td>
</tr>
<tr>
<td>M3 5000</td>
<td>9 25,7</td>
</tr>
<tr>
<td>M5 6000</td>
<td>12 4,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>35 100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Source: Data Penerbit 2001</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Data tampak situs Agensi 2001</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* Rata-rata penguriman terjadinya peningkatan ekonomi, luasnya pelayanan kecamatan, kesejahteraan warga, serta pelayanan rumah sakit.

* Rata-rata penguriman terjadinya peningkatan ekonomi, luasnya pelayanan kecamatan, kesejahteraan warga, serta pelayanan rumah sakit.

* Rata-rata penguriman terjadinya peningkatan ekonomi, luasnya pelayanan kecamatan, kesejahteraan warga, serta pelayanan rumah sakit.

* Rata-rata penguriman terjadinya peningkatan ekonomi, luasnya pelayanan kecamatan, kesejahteraan warga, serta pelayanan rumah sakit.

* Rata-rata penguriman terjadinya peningkatan ekonomi, luasnya pelayanan kecamatan, kesejahteraan warga, serta pelayanan rumah sakit.
sangat signifikan terutama berkatian dengan perubahan status ekonomi migran yang ditandai dengan peningkatan pendapatan per kapita keuangan migran di daerah asal dan berubahnya pola konsumsi masyarakat dengan baik. Hal ini terutama disebabkan antara lain oleh kurang jelasnya arah kebijakan pengembangan sumberdaya manusial yang dilakukan.

Berangkat dari sana, semangat lokalitas yang kuat sebagai citi

tabel 6
MIGRAN KEMBALI YANG BERALIH PROFESI PASCA MIGRANSI
BERDASARKAN DAERAH TUJUAN MIGRANSINYA 2001

<table>
<thead>
<tr>
<th>Negara/Tujuan Migrasi</th>
<th>Pekerjaan Sebelum Migrasi</th>
<th>Pekerjaan Setelah Migrasi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Pertanian*</td>
<td>Non Pertanian</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jml</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>Malaysia Timur</td>
<td>27</td>
<td>13,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Malaysia Banting</td>
<td>168</td>
<td>86,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Negara lainnya</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>jumlah</td>
<td>195</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Data Pencatat 2001
*menunjuk bahwa ini adalah peluang terakhir pertukaran, peningkatan, pengiriman, sederhana bukan terakhir pengembangan.

secara umum di daerah bersangkutan.

Dalam konteks pembangunan lokal, meskipun secara politis sebenarnya program pembangunan ekonomi migrasi internasional khususnya di kabupaten Lombok Ternate telah dilakukan melalui kebijakan pembangunan daerah (APBD) Lombok Ternate, 2002 dengan mengalokasikan arus darah 1,5 miliar untuk kini tetapnya, kerja, tetapi secara substansial asinggannya strategi tersebut belum sepenuhnya berjalan kelompok migran, aktivitas yang dilakukan terutama oleh kelompok migran ssak selalu dilakukan dalam koridor solidaritas etnik. Hal ini selain dari kekuatan jaringan migran yang terbentuk di antara masyarakat Sasak pada sektor-sektor: kerja tertentu, baik di negara asal maupun negara tujuan. Sebagai sebuah kelompok etnik yang mempunyai orientasi etnik yang kuat, masyarakat Sasak dalam setiap aktivitas yang dilakukan dibangun oleh formalisasi-
formulaik kelompok sebagai basis aktivitas ekonominya pada lapisan bawah dimana sebagian besar mereka melakukan aktivitas.

Dalam konteks lokal kehidupan kelompok migran kembali pun memiliki dimensi positif bagi pertumbuhan pasar kerja lokal. Hal ini mengingat secara ekonomi keluarga migran tersebut sesungguhnya memiliki modal cukup untuk bersaing di pasar kerja yang ada. Di samping modal ketempaan yang diperoleh selama migrasi, kelompok ini juga memiliki kemungkinan lebih besar untuk menciptakan kesempatan kerja.

Daegan demikian, dapat pula diasumsikan bahwa kelompok-kelompok migran kembali orang Sasak dapat menjadi sasul agen ranformasi pembangunan yang cukup penting di wilayah asalnya.

Fakta yang ditemukan sepenuhnya menunjukkan adanya kontribusi besar orang Sasak tetap dalam proses pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipunnya aktivitas ekonomi dan perdagangan lokal, terjadinya substitusi tenaga kerja dan sektor pertanian ke sektor non pertanian merupakan fenomena yang dapat dilihat secara nyata dari keterlibatan migran dalam bidang-bidang pembangunan yang dimaksud.

Oleh karena itu, tidak berlebihan pula jika kelompok migran Sasak dapat dianggap sebagai 'agen' pembangunan terutama lagi daerahnya masing-masing.

Secara makro, keterlibatan kelompok besar migran dalam proses pembangunan tersebut telah membuka peluang-peluang baru untuk bekembangnya aktivitas ekonomi dan penciptaan pekerja kerja baru. Hal ini lebih jauh akan membantu implikasi pada terjadinya akumusi putaran "modal daerah" yang semula didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu seperti calo dan agen pergerak jasa tenaga kerja. Dengan demikian, arus migrasi internasional keluar akan mengalami perubahan karena orientasi ekonomi yang semula ada di pusat wilayah akan kembali bengker di dalam secala daerah sebagai akibat terjadinya perubahan upak ya rasional.

Meskipun demikian, tidak dapat disangkal pula bahwa keterlibatan migran Sasak dalam menciptakan kesesuaian pasar di daerahnya juga menciptakan polarisasi-polarisasi baru berdasakan alasan-alasan klasik pada tingkat ketempaan dan pendidikan pekerja. Alasannya tidak dapat didiumandakan pula bahwa polutan tersebut juga akan menciptakan perbedaan-perbedaan berdasarkan tingkat pendidikan dan status pekerja yang ada. Hal ini lebih jauh akan menghadirkan kesempatan lebih besar untuk munculnya persaingan-persaingan kerja yang pada tingkat pekerjaan formal dan pada sektor-sektor informal yang menggenkekan munculnya kegian ekonomi seka la mungkin dan kecil.

Dalam konteks bekembangnya semangat lokalitas pembangunan, maka peran migran kembali dalam proses pembangunan daerah pun tidak dapat dianggap marginal. Oleh karena itu, pula
dihakata bahwa kontribusi migra
dan migrasi kembali dalam proses pembangunan daerah harus
diperhitungkan sebagai variabel pen
ding di samping variabel-variabel lain yang telah
telah diukur sebagai komponen untuk menseku tak ke
berhasilan pelaksanaan pembangunan daerah.

Nama demikian, dalam
sehruh proses migrasi yang diukuk
orang Sakat mata kemiskinan hampir
melerat dalam seduh aktivitas yang
dilakukan. Hal ini pada gilirannya
memberikan wama di dalam sebusuh
proses migasi yang bedaging di
dalam nasional Sakat. Kendi ini
telah melendahbakti pesti migri di
dalam sebuaiah proses aktivitas pasar
kerja, baik di tingkat lokal, nasional,
nasional internasional. Eksotinya
pesta njar pekerja migri tersebut
dipersarak lagi oleh kebijakan
penempatan tenaga kerja internasional
yang tidak memikir daras halam
kupuk kaut unuk memberikan
jukinan perlindungan kepada pekerja

Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang
dapat ditakar dari hasil penelitian yang
telah dilakukan dapat dirumuskan sebagai berikut. Perlihatan, berdasarkan
setingkat penelitian yang dilakukan pada
kurang dari dua (2) kondisi
penting yang menyaksikan migri
pekerja orang Sakat dari Lombok
Timur melalui aktivitas migri,
satuan kemiskinan, tendanya
kesempurna kerja dan rendahnya
tingkat upah di sebera asalnya.

Kota, aktivitas migasi yang
dilakukan oleh kelompok migra
Sakat dari daerah penelitian memiliki
kontribusi besar terhadap
pembangunan daerah. Jumlah besar
jenvis yang dihasilkan terutama
melalui tenaga yang diukur ke daerah
pada membentuk suatu bingkai besar
kepad daerah sehingga proses
pembangunan yang dilakukan terdapat
disadari oleh pemerintah lokal telah
dibantu oleh kelompok migra
pekerja.

Kesimpulannya, data
lapangan yang diperoleh memperjelas
terjadinya perubahan-perubahan
status social yang sangat berarti
terhadap bahan migri dan keluarganya
di daerah asal. Terjadinya perubahan
status social, masalah dari seorang
petani menjadi seorang pedagang
maupun keberada di suatu jasa lajanya menjadi
indikasi penting terjadinya
peningkat status social-economis
migran dan keluarganya.

Kemampuan di kantorkan lokal
kehidupan kelompok migra kembali
memiliki dimensi positif bagi
penurunan pasar kerja lokal. Hal ini
inggi mengingat kelompok migri tersebut
memiliki modal cukup untuk bebas
di pasar kerja yang ada tetapi masih
meninggalkan biaya keberangkat
baru. Dengan demikian, dapat ditakak,
bahwa kelompok-kelompok migar
kembali di Lombok Timur
khususnya dapat menjadi
agen transmisi pembangunan yang
penting bagi daerah asalnya.

Volume II, Number 1 (Des 2004)
REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil-bahasa yang diperoleh pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perbaikan kebijakan yang diperlukan perlu dilakukan dalam beberapa aspek yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah. Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan kebijakan pembangunan daerah yang seimbang dengan kebutuhan dan potensi daerah. Dengan demikian, kebijakan pembangunan daerah harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah setempat. Selain itu, perlu adanya evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan untuk menilai efektivitas dan efisiensinya.

Kesimpulan

Perlu diperhatikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi saja, tetapi juga perlu memperhatikan aspek sosial dan budaya. Dalam hal ini, perlu adanya kebijakan yang mendukung keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Selain itu, perlu adanya sistem yang adil dan transparan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penutup

Dengan demikian, perlu adanya kebijakan yang mendukung keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Selain itu, perlu adanya sistem yang adil dan transparan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ref: Volume 1, Nomor 1 (Eka 2004)


